

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MELISA OVI SILVIANA

NIM. 12030113120063

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melisa Ovi Silviana
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113120063
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**
Dosen Pembimbing : Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., CMA, CRP

Semarang, 27 Januari 2017

Dosen Pembimbing,



(Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., CMA, CRP)

NIP. 197109042001121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Melisa Ovi Silviana
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113120063
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Maret 2017

Tim Penguji

1. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., CMA, CRP

(.....)

2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

(.....)

3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.

(.....)

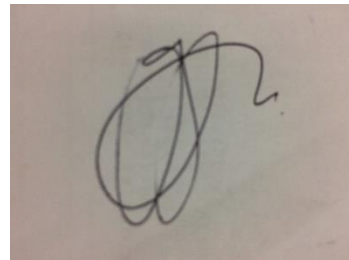
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Melisa Ovi Silviana, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to be 'Melisa Ovi Silviana'.

Melisa Ovi Silviana

12030113120063

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya”

Yesaya 40:29

“Don't just be yourself, but improve yourself”

NN

Skripsi ini ku persembahkan bagi :

Mama dan Papa

Terimakasih untuk semua cinta

dan kerja kerasmu untukku,

serta kakaku, sahabatku, dan semua orang yang mencintaiku

dan selalu mendukungku

Terimakasih untuk membuat hidupku lebih indah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance and executive compensation on tax avoidance. Corporate governance is proxied by financial expertise of the audit committee, independent commissioner, ownership structure (family, foreign, and government), and executive compensation. Tax avoidance is measured by effective tax rate.

This study use quantitative research design and secondary data from non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange. By using purposive sampling in the observation period 2015, obtained 120 observations. Data were analyzed using ordinary least square regression model.

Regression result that independent commissioner has negative effect on tax avoidance. Financial expertise of the audit committee and executive compensation have positive effect on tax avoidance. Meanwhile, family ownership, foreign ownership, and government ownership do not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords : tax avoidance, corporate governance, audit committees, independent commissioner, executive compensation, ownership structure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan diproksikan dengan ahli keuangan dalam komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah), dan kompensasi eksekutif. Penghindaran pajak diukur dengan *effective tax rate* (ETR).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dan data sekunder yang berasal dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan *purposive sampling* dalam periode pengamatan tahun 2015, didapatkan 120 observasi. Data dianalisis menggunakan model *ordinary least square*.

Hasil regresi menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Ahli keuangan dalam komite audit dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan keluarga, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapan Anis Chariri, S.E., M.Com., Akt., Ph.D. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Fuad, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D., CMA, CRP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, arahan dan semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

6. Orang tua, kakak-kakak penulis, dan seluruh keluarga. Terimakasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan tiada henti yang telah diberikan untuk penulis.
7. Stephanie Vicario Sigo, sahabat sejak TK yang telah menjadi tempat berkeluh kesah dan tidak henti-hentinya memberikan motivasi hingga saat ini.
8. Ignatius Henry Raditya, yang banyak memberi bantuan, motivasi, kritik, dan saran selama penyelesaian skripsi hingga kini.
9. GCC, Indraningtyas, Dita, Arinta, Tita, Duwi, Intan, sahabat sejak SMP, yang selalu memotivasi serta membantu apabila penulis merasa lelah dan kesusahan.
10. GS (Gadis Sholehah), Aida, Ina, Eno, Fatim, Gita, Jeska, Juple, Novi, Mala, dan SM 13, Andriyo, Adit, Eben, Imam, Ivanno, Mikael, Rizki, Saihu, Sandhi, Tio, Wira, Yudhis, yang selalu menemani dan mendukung penulis sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat seperjalanan: Lilis, Resi, Julius dan Sayoga, yang telah memberikan arahan serta motivasi begitu besar pada saat penulis mengalami kejenuhan dan keraguan.
12. Sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala doa, motivasi, bantuan, dan dukungan dalam segala bentuk yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, maupun bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terimakasih.

Semarang, 27 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	10
2.1.1 Agency Theory.....	10
2.1.2 Penghindaran Pajak	13
2.1.3 Tata Kelola Perusahaan.....	15
2.1.3.1 Ahli Keuangan dalam Komite Audit.....	18
2.1.3.2 Komisaris Independen	19
2.1.3.3 Struktur Kepemilikan Perusahaan	20
2.1.3.4 Kompensasi Eksekutif.....	22
2.1.4 Penelitian Terdahulu	23

2.2	Hipotesis	29
2.2.1	Ahli Keuangan dalam Komite Audit.....	29
2.2.2	Komisaris Independen.....	30
2.2.3	Struktur Kepemilikan Perusahaan.....	31
2.2.4	Kompensasi Eksekutif.....	33
2.3	Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	36
3.1.1	Variabel Dependen.....	36
3.1.2	Variabel Independen	36
3.1.3	Variabel Kontrol.....	39
3.2	Populasi dan Sampel	41
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5	Metode Analisis	43
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	44
3.5.2.1	Uji Normalitas	45
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas	45
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas	45
3.5.2.4	Uji Korelasi	46
3.5.3	Uji Hipotesis.....	46
3.5.3.1	Koefisien Determinasi	46
3.5.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	47
3.5.3.3	Uji Signifikan Parameter Individual.....	47
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	48
4.2	Analisis Data	50
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	54
4.2.2.1	Uji Normalitas	54
4.2.2.2	Uji Multikolinieritas	55

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	56
4.2.2.4 Uji Korelasi	58
4.2.3 Uji Hipotesis.....	59
4.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	63
4.4 Interpretasi Hasil	64
4.4.1 Hipotesis 1	64
4.4.2 Hipotesis 2.....	65
4.4.3 Hipotesis 3.....	66
4.4.4 Hipotesis 4.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan.....	74
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	25
TABEL 4.1	Ringkasan Sampel Penelitian	48
TABEL 4.2	Statistik Deskriptif	50
TABEL 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas	56
TABEL 4.4	Pearson Corellation Matrix	58
TABEL 4.5	Hasil Uji Hipotesis	59
TABEL 4.6	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	63

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Kerangka Pemikiran	35
GAMBAR 4.1	Grafik Histogram Regresi.....	54
GAMBAR 4.2	Grafik Uji Normalitas P-Plot	55
GAMBAR 4.3	Grafik Plot	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	79
LAMPIRAN B	Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif	83
LAMPIRAN C	Hasil Analisis Regresi	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar adalah pajak. Menurut Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan), pada tahun 2015 penerimaan pajak negara Indonesia mencapai 1.055 triliun rupiah. Pendapatan negara ini antara lain digunakan untuk kepentingan masyarakat, dimana masyarakat akan mendapatkan manfaat yang dirasakan secara tidak langsung berupa fasilitas umum dan infrastruktur; pertahanan dan keamanan; subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak; pengembangan alat transportasi massa; dan lain-lain. Dengan adanya manfaat-manfaat ini maka pemerintah sangat berharap bahwa wajib pajak, baik pribadi maupun badan, taat dalam hal penyetoran pajak.

Apa yang diharapkan oleh pemerintah ini, bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh pengusaha. Para pengusaha akan berusaha semaksimal mungkin untuk memangkas biaya-biaya operasional, termasuk diantaranya adalah biaya pajak (beban pajak), untuk meningkatkan pemasukan perusahaan. Menurut Blaufus *et al* (2016) legalitas dari perilaku untuk meminimalisir pembayaran pajak masih belum jelas, dikarenakan batasan diantara suatu hal yang legal dan illegal tidak jelas dan berbeda di setiap negara. Usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak inilah yang dinamakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Praktik penghindaran pajak tidak dilarang di Indonesia dikarenakan tidak ada hukum yang mengaturnya, tetapi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak akan memberi kesan buruk terutama pada masyarakat. Masyarakat memandang praktik penghindaran pajak ini membatasi transfer pendapatan mereka, padahal seharusnya perusahaan ikut berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fuest & Riedel, 2009). Berbeda dengan masyarakat, perusahaan menganggap praktik penghindaran pajak ini menguntungkan mereka, terlebih dalam hal ekonomi (Armstrong *et al*, 2015). Pemegang saham selaku pemilik perusahaan sangat mengharapkan adanya praktik penghindaran pajak, sehingga para pemegang saham dapat menerima pengembalian yang berlipat ganda dari investasi mereka.

Keputusan dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan diadakan oleh manajer perusahaan, karenanya praktik penghindaran pajak dan *managerial rent extraction* (tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi) dapat saling berhubungan (Desai & Dharmapala, 2006). Disinilah peran dari tata kelola perusahaan diperlukan, agar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat memberikan transfer nilai bagi perusahaan. Pada perusahaan yang memiliki mekanisme tata kelola yang buruk, praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajer tidak menimbulkan transfer nilai bagi perusahaan (Wahab & Holland, 2011), dikarenakan adanya peluang manajer untuk mengalihkan sumber daya perusahaan untuk keuntungan manajer itu sendiri (Desai & Dharmapala, 2006). Berlawanan dengan Desai dan Dharmapala (2006),

Armstrong *et al* (2015) tidak berpendapat bahwa penghindaran pajak pasti akan menghasilkan peluang penyimpangan manajer.

Untuk mencegah tindakan penyimpangan manajer tersebut, pemegang saham memberikan kompensasi insentif kepada manajer, sehingga diharapkan manajer dapat melakukan penghindaran pajak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Para manajer harus mendapatkan kompensasi yang kuat untuk mengurangi pembayaran pajak, agar manajer mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi (Armstrong *et al*, 2015). Menurut Desai dan Dharmapala (2006), pemberian kompensasi dalam penghindaran pajak hanya dilakukan pada perusahaan dengan tata kelola yang baik. Pada perusahaan dengan tata kelola yang buruk, perusahaan tidak menggunakan kompensasi dalam mendorong penghindaran pajak untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh manajer. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk, dimana manajer memiliki *control of the board*, akan membayar manajer dengan berlebihan dalam bentuk ekuitas (Bebchuk & Fried, 2003).

Tingkatan dalam penghindaran pajak berbeda-beda tergantung pada kepentingan pihak (perusahaan) yang terkait. Dalam mencapai tingkatan dalam penghindaran pajak perusahaan, diperlukan adanya ahli keuangan dalam komite audit, yang mana komite audit ini bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Ahli keuangan diperlukan untuk mencegah perusahaan berada pada *over-* dan *under-investment*. Ketika perusahaan berada pada *over-investment*, maka perusahaan akan berusaha untuk mengurangi penghindaran pajak, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan berada pada *under-investment*, maka

perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan penghindaran pajak, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlalu rendah (Armstrong *et al*, 2015).

Desai dan Dharmapala (2006) mengatakan, permasalahan agensi di dalam perusahaan dapat timbul dikarenakan oleh penghindaran pajak apabila pemegang saham dan manajer mengevaluasi biaya dan laba dengan cara yang berbeda. Pada perusahaan yang memiliki masalah agensi yang belum terselesaikan, dapat membuat manajer untuk memilih tingkat penghindaran pajak yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Untuk mengukur kemampuan, mengukur kompensasi insentif, dan mengamati kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer, diperlukan adanya komisaris independen. Komisaris independen dipercaya dapat mengatasi permasalahan agensi ini. Ketika perusahaan berada dalam tingkat penghindaran pajak yang ekstrim, dengan semakin banyaknya komisaris independen, maka perusahaan akan berusaha untuk melemahkan penghindaran pajak tersebut, yang mana kemungkinan besar hal ini merupakan gejala dari permasalahan agensi.

Penghindaran pajak merupakan salah satu dari beberapa banyak hal yang berisiko pada manajemen. Dengan adanya risiko yang ditimbulkan oleh penghindaran pajak ini, perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi pada investor dalam jumlah yang kecil, tidak melakukan penghindaran pajak agresif. Menurut Chen *et al* (2010), level keagresifan pajak pada perusahaan non-keluarga lebih besar dibandingkan dengan perusahaan keluarga. Hal ini dikarenakan kepemilikan keluarga tidak ingin untuk membayar denda pajak serta tidak ingin

untuk merusak reputasi perusahaan, sehingga perusahaan lebih rela untuk membayar pajak yang tinggi. Sama seperti kepemilikan keluarga, kepemilikan asing juga tidak ingin untuk merusak reputasi negara atau perusahaan pusat, sehingga kepemilikan asing lebih berusaha untuk mengurangi adanya penghindaran pajak. Selain kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing, dalam struktur kepemilikan terdapat pula kepemilikan pemerintah yang memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. Kepemilikan pemerintah ini biasa disebut BUMN (Badan Umum Milik Negara) (Rusydi & Martani, 2014).

Penelitian mengenai hubungan penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan sudah banyak dilakukan. Hasil dari penelitian mengenai hubungan penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh faktor dari individu yang terlibat (Dyrenge *et al*, 2010), dan faktor dari lingkungan yang berbeda di setiap negara (Wahab & Holland, 2011). Untuk di luar Indonesia, penelitian mengenai hubungan ini sudah dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) yang menginvestigasi apakah tata kelola perusahaan berhubungan dengan pencapaian tingkat penghindaran pajak, tetapi hubungannya sangat sedikit; Rego dan Wilson (2012) yang menemukan bahwa perusahaan dengan manajer yang memiliki kompensasi ekuitas yang besar lebih sering melakukan penghindaran pajak. Tetapi Rego dan Wilson gagal untuk menemukan bukti mengenai hubungan diantara mekanisme tata kelola dan penghindaran pajak; dan Robinson *et al* (2013) yang mendapatkan bukti bahwa ahli finansial komite audit berhubungan positif dengan perencanaan pajak, tetapi hubungan ini menjadi negatif ketika perencanaan pajak menjadi sangat berisiko. Sedangkan

untuk di Indonesia penelitian mengenai hubungan ini sudah dilakukan oleh Pohan (2008); Annisa (2011); dan Irawan dan Farahmita (2012).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Armstrong *et al* (2015) yang meneliti tentang hubungan antara struktur tata kelola perusahaan, meliputi kompensasi eksekutif, dan penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Compustat. Hasil penelitian Armstrong *et al* (2015) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dengan proksi ahli keuangan dalam dewan direksi dan proporsi direktur independen tidak memiliki hubungan yang seragam dengan penghindaran pajak, dan juga menunjukkan bahwa kompensasi ekuitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang berbeda dari penelitian Armstrong *et al* (2015), penulis menggunakan sampel yang berbeda dan menggunakan istilah dalam variabel yang berbeda, dikarenakan Indonesia menganut sistem *two-tier*, sehingga variabel ahli keuangan dalam dewan direksi menjadi ahli keuangan dalam komite audit, dan direktur independen menjadi komisaris independen, serta dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel struktur kepemilikan dalam tata kelola perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, yang diproksikan dengan ahli keuangan dalam komite audit, komisaris independen, dan struktur kepemilikan perusahaan (keluarga, asing, dan pemerintah), termasuk kompensasi eksekutif terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan ahli keuangan dalam komite audit mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komisaris independen mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan struktur kepemilikan perusahaan mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah kompensasi eksekutif mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan ahli keuangan dalam komite audit dengan keputusan penghindaran pajak perusahaan.
2. Mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komisaris independen dengan keputusan penghindaran pajak perusahaan.

3. Mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan struktur kepemilikan perusahaan dengan keputusan penghindaran pajak perusahaan.
4. Mengetahui hubungan antara kompensasi eksekutif dengan keputusan penghindaran pajak perusahaan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan indikator untuk penilaian perusahaan serta dapat memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun pelanggan.

3. Pemegang Saham Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemegang saham perusahaan tentang mekanisme tata kelola perusahaan mana yang dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

4. Kajian Penelitian Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka pemikiran penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analisis penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.